

Komparasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam

^{1*}Fitria Idham Chalid, ²Siti Zubaidah

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

*fitria.chalid@trunojoyo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submit:

1 May 2025

Accepted:

10 May 2025

Publish:

19 May 2025

Article Type :

Literature Review

ABSTRACT (English)

Income distribution plays an important role in the economy in both conventional and Islamic economics. In conventional economics, income distribution often focuses on market efficiency, but this can lead to inequality and social disparities. In contrast, Islamic economics emphasizes the principles of justice, respect for the Shari'a, and equitable distribution of wealth, using instruments such as zakat, infaq, and waqf to reduce inequality and achieve social welfare. This study uses a literature review method, this study identifies the challenges faced in implementing both income distribution systems. The main challenges in conventional economics include economic inequality caused by unequal access to education and resources, while in Islamic economics, the challenges lie in the implementation of distribution mechanisms that are not yet optimal. This study concludes that although both face challenges, the Shari'a-based distribution system is more inclusive and oriented towards social welfare, making it a fairer alternative in the long run.

KEYWORD:

Islamic Economics

Conventional Economics

Income Distribution Inequality

ABSTRAK (Indonesia)

Distribusi pendapatan memainkan peran penting dalam perekonomian baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional distribusi pendapatan sering kali berfokus pada efisiensi pasar, namun hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketimpangan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap Syariah, dan pemerataan kekayaan, dengan menggunakan instrumen seperti zakat, infaq, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*), penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kedua sistem distribusi pendapatan. Tantangan utama dalam ekonomi konvensional meliputi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakmerataan akses pendidikan dan sumber daya, sementara dalam ekonomi syariah, tantangan terletak pada implementasi mekanisme distribusi yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keduanya menghadapi tantangan, sistem distribusi berbasis syariah lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, yang menjadikannya alternatif yang lebih adil dalam jangka Panjang

Copyright © 2020. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



1. Pendahuluan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi karena menyangkut persoalan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas pembangunan suatu negara. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, maka akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi tidak merata, yang pada akhirnya memperparah siklus kemiskinan dan memperlebar jurang sosial di tengah masyarakat.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan ini bukanlah hal baru. Dalam konteks global, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat di banyak negara, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin justru kian melebar. Kekayaan para miliarder tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada tahun 2024, kekayaan para miliarder melonjak tiga kali lipat dari tahun 2023, Sementara itu, jumlah orang yang mengalami kemiskinan pada dasarnya tetap tidak berubah dari tahun 1990 (OXFAM, 2025). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, menurut data dari BPS (2023) indeks ketimpangan (Gini ratio) masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, hal ini menandakan bahwa distribusi pendapatan belum berjalan secara merata

Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio Indonesia Periode September 2020 – Maret 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sistem ekonomi konvensional, yang menjadi dasar pengelolaan ekonomi di sebagian besar negara modern saat ini, menjelaskan distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar. Dalam sistem ini, pendapatan ditentukan oleh produktivitas dan kontribusi terhadap proses produksi. Artinya, orang yang memiliki modal atau keterampilan tinggi akan menerima pendapatan lebih besar. Secara teori, sistem ini dianggap efisien karena memberi insentif kepada individu untuk bekerja keras dan berinovasi. Namun dalam praktiknya, sistem ini juga melahirkan berbagai ketimpangan karena tidak semua orang memiliki akses atau peluang yang sama terhadap pendidikan, modal, atau teknologi. Selain itu, kekayaan cenderung terakumulasi pada kelompok elit ekonomi, sehingga mobilitas sosial menjadi sangat terbatas.

Sebaliknya, ekonomi Islam hadir dengan paradigma yang berbeda. Ia tidak hanya mempertimbangkan aspek produktivitas dan efisiensi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Dalam ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral setiap individu. Harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Islam memperkenalkan berbagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan secara

adil, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, Islam melarang praktik-praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), yang sering kali menjadi akar dari ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan distribusi dalam Islam adalah QS. Al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...". Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pemerataan dalam kepemilikan dan penggunaan kekayaan. Selain itu, dalam praktik kenegaraan, ekonomi Islam juga memberi peran penting kepada negara untuk mengelola sumber daya publik, menetapkan kebijakan fiskal yang adil, serta menjamin hak-hak ekonomi rakyat kecil.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai perbandingan sistem distribusi pendapatan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah telah meningkat. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi syariah lebih berfokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan sistem konvensional yang cenderung mendorong akumulasi kekayaan di kalangan segelintir individu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Al-Harbi, 2020), menunjukkan bahwa sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi konvensional cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh sistem bunga yang mendominasi, di mana pendapatan lebih terpusat pada pihak-pihak yang memiliki modal besar. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti zakat, infaq, shadaqah, dan larangan riba memberikan mekanisme distribusi yang lebih adil dan seimbang, yang berpotensi mengurangi ketimpangan. Dan penelitian (Ibrahim, 2019), menyoroti bahwa ekonomi konvensional menekankan pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi, seringkali mengabaikan distribusi yang adil. Dalam sistem syariah, konsep distribusi pendapatan diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (masalah). Dalam jangka panjang, distribusi berbasis syariah dianggap lebih inklusif karena mendorong redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dari penelitian-penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan stabil dalam hal distribusi pendapatan dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Distribusi berbasis syariah tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Studi-studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam kerangka ekonomi untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan ini dengan membuat perbandingan antara distribusi pendapatan di bawah prespektif ekonomi konvensional dan ekonomi Syariah. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem, serta pengaruhnya terhadap upaya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori ekonomi Islam, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memecahkan masalah distribusi pendapatan yang timpang

2. Kajian Pustaka

Distribusi

Distribusi adalah proses mengalokasikan sebagian keuntungan dari penjualan produk ke berbagai elemen produksi yang berkontribusi terhadap pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “distribusi” didefinisikan sebagai pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain (Dewantara, 2020). Secara umum, distribusi adalah pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, sedangkan konsumen adalah pihak yang menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa, dan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara bahasa, distribusi mengacu pada proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, seringkali melalui perantara. Dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi mencakup proses penerimaan dan pengeluaran sumber daya publik.

Dalam proses distribusi, pembayaran seperti sewa, upah, bunga modal dan keuntungan digabungkan sesuai dengan peran yang dimainkan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha. Dalam proses distribusi, penetapan harga dipertimbangkan dari sudut pandang alokasi uang dan bukan dari sudut pandang pihak yang menanggung biaya-biaya tersebut. Selain itu, distribusi sering dianggap identik dengan pemasaran. Terkadang, distribusi juga disebut sebagai distribusi fungsional (Lubis, 2020).

Prinsip dasar distribusi dari perspektif Islam adalah meningkatkan dan mendistribusikan kekayaan untuk memperluas sirkulasi kekayaan. Dengan cara ini, kekuasaan dapat didistribusikan secara merata dan tidak hanya di antara kelompok-kelompok tertentu. Dalam Islam, distribusi berarti pembagian kekayaan, baik pribadi maupun publik, kepada mereka yang berhak mendapatkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Syariah (Rozalinda, 2020). Menurut Anas Zarqa, distribusi didefinisikan sebagai perpindahan kekayaan antar individu, baik melalui pertukaran di pasar maupun dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Oleh karena itu, konsep distribusi dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan dan membagi hasil kekayaan sehingga peredarannya diperluas dan kekayaan terdistribusi secara merata dan tidak terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik.

Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah total semua pendapatan, baik moneter maupun non-moneter, yang diterima oleh individu atau rumah tangga selama periode tertentu. Penghasilan non-moneter dapat berupa barang, tunjangan perjalanan, dan sejenisnya. Pendapatan memainkan peran penting dalam memberikan informasi dalam neraca pajak. Jika pendapatan melebihi biaya yang dikeluarkan, perusahaan akan mengakui laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari biaya, perusahaan dapat mengalami kerugian (Iskandar, 2019).

Salah satu variabel terpenting yang menentukan jumlah laba atau rugi, keberhasilan perusahaan dapat diukur secara sederhana dari peningkatan pendapatan dalam satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, analisis yang lebih menyeluruh sangat penting untuk memverifikasi keakuratan pendapatan yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan. Menurut PSAK No. 23 revisi 2015, pendapatan didefinisikan sebagai uang yang diperoleh perusahaan dari aktivitas

regulernya dan dikenal dalam berbagai bentuk, seperti penjualan, jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa (Sadan Madji, 2019).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan library research atau penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun landasan teori dengan mempelajari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu fokus pada penelitian yang mengkaji konsep distribusi pendapatan dalam konteks ekonomi Islam serta membandingkan dengan distribusi pendapatan dalam konteks konvensional (Gunawan, 2016). Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data meliputi mencatat, mengutip, meringkas, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang dimanfaatkan. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, mensintesis, serta menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan (Sangdaji & Mamang, 2010).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Distribusi Pendapatan Konvensional

Konsep Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Distribusi pendapatan bergantung pada bagaimana pendapatan didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam suatu komunitas atau negara. Banyak negara berfokus pada distribusi pendapatan yang adil dan merata sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, distribusi pendapatan yang tidak merata juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan gender, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Ketidaksetaraan ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempersulit akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Inilah sebabnya mengapa banyak negara berusaha untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.

Distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi konvensional mengacu pada cara bagaimana uang didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat atau negara. Banyak negara berusaha mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui distribusi pendapatan yang adil dan merata. Namun, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses yang tidak setara terhadap sumber daya, perbedaan gender, dan perbedaan tingkat pendidikan (Tesalonika Chrisdiantien Dondo, 2019).

Dampak Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi sebagai berikut (Philip Arestis, 2019):

1) Penekanan pada kebutuhan masyarakat umum

Dengan tidak adanya kepercayaan pada kelompok kaya, menjadi sulit bagi anggota masyarakat yang kurang berhasil untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan konsumsi secara umum, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

2) Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi berisiko merusak stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara, karena hal tersebut merupakan ketidakadilan sosial dan politik. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik dan kerusuhan, yang dapat berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

3) Memburuknya akses terhadap sarana transportasi

Masyarakat umum belum terlalu mahir dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan alat pembayaran seperti kartu kredit dan kartu debit. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah dan membatasi kemampuan mereka untuk menyusun rencana kerja dan mengelola staf.

4) Keterbatasan Akses Pendidikan

Masyarakat yang kurang mampu juga cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

5) Menurunnya Investasi

Kesenjangan pendapatan juga dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika kesenjangan pendapatan semakin meningkat, maka investor mungkin akan ragu untuk melakukan investasi, karena mereka melihat adanya risiko yang tinggi dalam memasuki pasar yang tidak stabil.

6) Kurangnya Inovasi

Ketidaksetaraan pendapatan dapat menghambat inovasi dan pembangunan teknologi baru. Kelompok masyarakat yang kurang mampu cenderung tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan dan pelatihan, dan karenanya, kurang mampu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam menghasilkan inovasi dan teknologi baru.

7) Tumbuhnya Ketidakpuasan Sosial

Kesenjangan pendapatan yang besar juga dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, yang dapat memicu protes dan aksi demonstrasi, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Tantangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Tantangan dalam distribusi pendapatan merupakan salah satu isu utama dalam ekonomi konvensional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan sosial, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Tantangan dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari berbagai faktor, termasuk ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah, globalisasi, hingga perubahan teknologi. Berikut ini adalah

tantangan utama dalam pendistribusian pendapatan dalam perspektif ekonomi konvensional. (Nasir, 2019)

1) Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Penyebab utamanya antara lain, akses terbatas terhadap pendidikan karena biasanya individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih besar, sementara mereka yang kurang terdidik sering kali terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Hal tersebut memperburuk kesenjangan pendapatan dikarenakan ketidakmerataan akses pendidikan

2) Ketidakadilan Pajak

Ketidakadilan dalam sistem perpajakan adalah salah satu faktor utama dalam tantangan distribusi pendapatan. Karena apabila kebijakan fiskal dan perpajakan yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan. Misalnya, pajak yang lebih rendah untuk orang kaya dapat meningkatkan jarak antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

3) Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan karena adanya globalisasi menimbulkan perubahan struktur pada pekerjaan. Globalisasi sering kali mengakibatkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tradisional, sementara pekerjaan baru di sektor teknologi mungkin tidak tersedia bagi semua orang, itu dapat berakibat terjadinya kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Perubahan globalisasi juga mengakibatkan banyak pekerjaan dengan upah rendah bahkan terancam hilang hal tersebut memperburuk ketimpangan pendapatan.

Ekonomi Konvensional dalam Mengatasi Ketimpangan

Ekonomi konvensional menyadari bahwa ketimpangan pendapatan dan kekayaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun secara alami ekonomi pasar cenderung menghasilkan ketimpangan (melalui kompetisi dan akumulasi modal), berbagai intervensi kebijakan telah dikembangkan untuk meredam dampak negatifnya. Berikut adalah cara-cara yang digunakan:

1) Pajak Progresif

Salah satu instrumen utama dalam mengurangi ketimpangan adalah sistem perpajakan progresif, di mana individu atau badan dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak lebih besar. Tujuan dari pajak progresif sendiri yaitu mengurangi konsentrasi kekayaan dan menyediakan dana untuk program sosial. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak warisan, pajak kekayaan (*wealth tax* di beberapa negara).

2) Transfer dan Program Sosial

Pemerintah menyediakan bantuan sosial langsung atau tidak langsung kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya seperti subsidi pangan dan energi, jaminan kesehatan (seperti BPJS di Indonesia), pendidikan gratis,

bantuan tunai (BLT), dan jaminan pensiun. Adapun transfer ini bertujuan untuk memastikan kelompok miskin tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.

3) Kebijakan Upah Minimum

Pemerintah menetapkan upah minimum regional untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan pendapatan yang layak. Hal ini dapat membantu pekerja kelas bawah agar memiliki daya beli dan mengurangi kesenjangan upah antara buruh dan pemilik modal.

4) Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan

Ekonomi konvensional mendorong pemerataan kesempatan dengan cara meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Artinya ketika pendidikan meningkatkan, maka keterampilan juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, dan efeknya juga dapat meningkatkan pendapatan. Efek jangka panjangnya adalah mobilitas sosial yang lebih adil.

5) Pemberdayaan UMKM dan Akses Permodalan

Negara dan lembaga keuangan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas partisipasi ekonomi dari kelompok bawah. Ini mencakup kredit mikro, pelatihan usaha, dan pengembangan koperasi.

6) Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Inklusif

Pemerintah dan bank sentral menggunakan instrumen anggaran (fiskal) dan suku bunga (moneter) untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan inklusif.

7) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Keadilan Wilayah

Untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah (misalnya antara kota dan desa), ekonomi konvensional mendorong pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan internet di daerah tertinggal. Adapun tujuannya yaitu mendorong kegiatan ekonomi di wilayah pinggiran agar tidak terkonsentrasi di pusat kota atau daerah industri saja.

4.2. Distribusi Pendapatan dalam Islam

Konsep Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai bagian integral dari agama. Ekonomi Islam mengkaji bagaimana manusia berusaha mendistribusikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai kemakmuran (*falah*), berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ekonomi Islam terkait erat dengan agama, yang merupakan ciri utama yang membedakannya dari ekonomi kapitalis.

Dari perspektif Islam, distribusi mengacu pada alokasi sumber daya publik dan swasta kepada penerima manfaat yang tepat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, sesuai dengan hukum Syariah. Pilar teori distribusi Islam adalah untuk menghindari ketidaksetaraan dan memastikan bahwa pendapatan tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, tetapi bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Syariah didasarkan pada kemampuan *maqasid syariah* yang melindungi iman, jiwa, keturunan, dan harta benda (Rozalinda, 2020).

Para ulama mengklasifikasikan distribusi ini sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut: 1) *Daruriyah* (kebutuhan primer), yang bersifat esensial dan terkait langsung

dengan kesejahteraan dan kepentingan publik, baik di dunia maupun di masa depan; 2) *Hajiyah* (kebutuhan sekunder), yang bertujuan untuk memudahkan dan memenuhi tantangan kehidupan, baik di dunia maupun di masa depan; dan 3) *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier), yang secara langsung terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan kepentingan publik (Hikam, 2023).

Dalam Islam, distribusi pendapatan adalah ditunjukkan kepada mereka yang memiliki kapasitas untuk melakukannya, baik itu individu maupun masyarakat luas, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa hormat masyarakat terhadap hukum Syariah. Penekanannya adalah pada proses distribusi kekayaan dalam Islam. Dalam bahasa Indonesia, ini berarti bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan sebagian besar dari hati mereka kepada mereka yang memiliki *surplus*, sebagai semacam kompensasi atas kerugian mereka, dan mereka juga berfungsi sebagai insentif bagi orang lain yang tidak seberuntung mereka (*defisit*) (Octaviar Wilmar Ervanni, 2024).

Dampak Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut (Qodir, 2021):

- 1) Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah.
- 2) Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat.
- 3) Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan dan juga memastikan agar jangan sampai sektor publik jatuh ke tangan perorangan maupun kelompok.
- 4) Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik, yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti: sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya, sektor publik ini menjadi tanggungjawab negara dalam rangka menjaga dan bentuk tanggungjawabnya terhadap rakyatnya.

Perolehan pendapatan harus dibarengi dengan kegiatan distribusi, sebab distribusi pendapatan itu sendiri dapat menjadi faktor penting dalam upaya memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat, terlebih lagi jika pendapatan yang didapatkan dan didistribusikan tersebut bersumber dari pekerjaan yang halal, maka distribusi pendapatan akan turut memperbaiki akhlak atau moral orang yang mendistribusikan dan yang mengonsumsinya. Tak hanya itu, distribusi pendapatan juga dapat mempererat hubungan sosial di antara masyarakat, sehingga konflik atau permasalahan politik akan sangat jarang terjadi, ini tentu saja karena tidak ada kebencian yang terpendam dalam hati, dan semua berawal dari rasa saling peduli

Tantangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Meskipun prinsip-prinsip syariah mendukung redistribusi kekayaan melalui

mekanisme zakat, infaq, dan shodaqoh tetapi terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi (Rahmawaty, 2013). Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pendistribusian pendapatan menurut perspektif ekonomi syariah.

1) Ketimpangan Ekonomi

Ekonomi syariah menekankan redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan waqof. Namun, tantangan utama adalah kurangnya implementasi optimal dari mekanisme ini. Di banyak negara dengan sistem syariah, pengumpulan zakat dan pengelolaannya sering kali kurang efisien, sehingga tidak mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara maksimal. Selain itu, regulasi dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial ini masih memerlukan perbaikan.

2) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Ekonomi Syariah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah salah satu tantangan besar dalam mendistribusikan pendapatan dalam perspektif ekonomi syariah. Edukasi tentang zakat, infaq, dan wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan peran mereka dalam membantu sesama dan mengurangi ketimpangan. Tanpa pemahaman yang baik, partisipasi masyarakat dalam mekanisme redistribusi ini akan rendah.

3) Sistem Ekonomi yang Dominan

Dominasi sistem ekonomi konvensional sering kali menghambat penerapan kebijakan distribusi pendapatan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Dalam banyak kasus, sistem pasar bebas cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara kelompok marginal tetap terpinggirkan. Hal ini menciptakan tantangan bagi implementasi distribusi kekayaan yang adil.

Meskipun prinsip-prinsip ekonomi syariah menyediakan kerangka kerja untuk mencapai keadilan distribusi pendapatan, tantangan-tantangan tersebut memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi yang efektif dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam dalam Mengatasi Ketimpangan

Ekonomi Islam menawarkan berbagai prinsip yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan dan Kepemilikan Terbatas

Ekonomi Islam memandang bahwa seluruh kekayaan hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai khalifah (pengelola). Oleh karena itu, kepemilikan pribadi diakui, tetapi dibatasi oleh kewajiban sosial. Harta tidak boleh dimonopoli dan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menjadi dasar bahwa distribusi kekayaan harus adil dan merata.

2) Instrumen Zakat

Zakat merupakan pilar utama dalam sistem distribusi Islam. Zakat adalah kewajiban finansial yang dibebankan kepada Muslim yang mampu untuk membantu delapan golongan mustahik (QS. At-Taubah: 60). Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa zakat yang diterima oleh kelompok miskin dapat

meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan sosial.

3) Sedekah, Infak, dan Wakaf

Selain zakat yang wajib, Islam menganjurkan infak dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Wakaf, sebagai harta yang disedekahkan secara permanen untuk kepentingan umum (seperti pendidikan, layanan kesehatan, dll.), juga memainkan peran besar dalam pengurangan ketimpangan jangka panjang.

4) Larangan Riba dan Praktik Ekonomi Eksploitatif

Islam melarang riba karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam transaksi. Riba memungkinkan orang kaya bertambah kaya tanpa usaha, sementara orang miskin semakin tertindas oleh bunga utang. Selain riba, Islam juga melarang Gharar (ketidakpastian yang merugikan pihak tertentu), dan Maysir (judi atau spekulasi berisiko tinggi). Larangan ini melindungi masyarakat dari eksploitasi dan instabilitas ekonomi.

5) Distribusi Sumber Daya dan Peran Negara

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran aktif dalam mengelola sumber daya publik seperti tanah, air, tambang, dan sumber daya alam lainnya untuk kepentingan bersama. Negara juga berkewajiban menjamin kebutuhan dasar rakyat (makanan, kesehatan, pendidikan), dan mencegah praktik monopoli dan akumulasi harta berlebihan

6) Sistem Warisan dan Pewarisan yang Adil

Hukum waris dalam Islam mengatur pembagian harta secara adil kepada ahli waris yang sah, dan mencegah penumpukan kekayaan dalam satu tangan atau dinasti. Hal ini membantu mencegah ketimpangan antargenerasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

5. Kesimpulan

Distribusi pendapatan merupakan aspek strategis dalam ekonomi, baik konvensional maupun Islam, karena berpengaruh pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Dalam ekonomi konvensional, distribusi pendapatan bergantung pada mekanisme pasar yang sering kali menciptakan kesenjangan akibat faktor seperti pendidikan, akses sumber daya, dan globalisasi. Dampak negatifnya meliputi penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ketidaksetaraan, dan terganggunya stabilitas sosial.

Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan distribusi yang adil melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan shodaqoh, dengan tujuan mencapai kesejahteraan (falah) dan keadilan sosial. Pendekatan ini berlandaskan prinsip maqasid syariah, yang memastikan kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier terpenuhi. Namun, tantangan implementasi distribusi syariah meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, efisiensi pengelolaan dana sosial, dan dominasi sistem ekonomi konvensional.

Secara keseluruhan, baik sistem konvensional maupun Islam menghadapi tantangan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi ekonomi untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Referensi

- Al-Harbi, D. (2020). The Impact of Islamic Economic System on Income Distribution: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Economics*, Vol. 12(No. 3), hlm. 105-118.
- BPS. (2023). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023. *Berita Resmi Statistik*, No. 48/07/(17 Juli 2023), 1–8.
- Dewantara, A. (2020). Etika Distribusi Ekonomi Islam :Perbandingan Sitem Distribusi kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam. *Ad-Deenar:Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (IV (ed.)). Bumi Aksara.
- Hikam, A. B. (2023). DISTRIBUSI DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 6(No. 2), hlm. 128.
- Ibrahim, Z. &. (2019). ncome Distribution in Islamic Economy: A Welfare Perspective. *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 11(No. 2), hlm. 215.
- Iskandar. (2019). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, Vol. 1(No. 02), hlm. 128.
- Lubis, A. T. (2020). DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JIBF Madina: Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 1(No. 1), hlm. 55.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Octaviar Wilmar Ervanni, et. al. (2024). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, Vol. 1(No. 1), hlm. 54.
- OXFAM. (2025). *Extreme inequality and poverty*. https://www-oxfamamerica-org.translate.google/explorer/issues/economic-justice/extreme-inequality-and-poverty/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Philip Arestis, et. al. (2019). Income distribution and growth revisited. *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol. 49, hlm. 1-4.
- Qodir, A. (2021). EFISENSI DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Mozaic: Islamic Nusantara*, Vol. 7(No. 1), hlm. 47-57.
- Rahmawaty, A. (2013). DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Rozalinda. (2020). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sadan Madji, dkk. (2019). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI RUMPUT LAUT DI DESA NAIN KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA. *Jurnal EMBA*, Vol. 7(No. 3), hlm. 4000.
- Sangdaji, & Mamang, E. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Andi Offset.
- Tesalonika Chrisdiantien Dondo, D. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MINAHASA. *AGRIRUD*, Vol. 1(No. 1), hlm. 61.